Vol. 4, No. 3, September 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Peran Strategis Partai Politik Islam-Nasionalis Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Dan Kelembagaan Inklusif: Analisis Perbandingan Dan Kontribusi Terhadap SDGs di Indonesia

Rifky Ahmad Baihaqi [(1)]*, Amelia Amanda Tunggadewi [(2)], Dwi Susanti [(3)], Febrianti [(4)], Najma Nur Hidayah [(5)], Sri Untari [(5)]

[(1) (2) (3) (4) (5) (6)] Departemen Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia

Email : [(a*)] rifqi.ahmad.2407116@students.um.ac.id, [(b)] amelia.amanda.2407116@students.um.ac.id, [(c)] dwi.susanti.2407116@students.um.ac.id, [(d)] febrianti.2407116@students.um.ac.id, [(e)]najma.nur.2407116@students.um.ac.id, [(f)]sri.untari.fis@um.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengulas perbandingan pendekatan yang diambil oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam meningkatkan keadilan sosial serta menciptakan institusi yang inklusif di Indonesia, bersama dengan kontribusi mereka terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penelitian kualitatif ini menerapkan metode studi kasus dengan data utama yang terdiri dari wawancara mendalam, dokumen partai, dan literatur ilmiah dalam lima tahun terakhir. Metode pengumpulan data mencakup wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan studi literatur, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa PKB lebih fokus pada inklusivitas dan nasionalisme berbasis agama, sedangkan PKS tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam dan pelatihan yang terstruktur. Keduanya memberikan sumbangsih terhadap SDG 4, 5, 10, dan 16, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar seputar kaderisasi dan inovasi dalam politikn data dan análisis data dengan studi kasus) . Hasilnya (mengacu tujuan proyek)

Kata kunci: Partai Politik, PKB, PKS, Keadilan Sosial, Kelembagaan Inklusif, SDGs, Kaderisasi, Politik Islam.

ABSTRACT

The study reviewed approaches taken by the national awakening party (PKB) and the welfare justice party (PKS) to promote social justice and to create inclusive institutions in Indonesia, along with their contributions to the sustainable development goals (SDGS). The qualitative work implemented case studies with the main data of in-depth interviews, party documents, and scientific literature in the last five years. Data collection methods include semi-structured interviews, documentation, and literature studies, while data analysis is done with a descriptive approach. Research indicates that the parties focused more on inklusivity and religion- based nationalism, while the PKS held to islamic principles and structured training. Both contribute to the SDGS 4, 5, 10, and 16, though they face challenges both inside and outside of the political issue and innovation.

Keywords: *Political Parties, PKB, PKS, Social Justice, Inclusive Institutions, SDGS, Kaderisation, Islamic politics.*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
03.06.2025	07.07.2025	25.08.2025	30.09.2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Partai-partai Islam yang memiliki sifat nasionalis di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan keadilan sosial serta memperkuat lembaga yang bersifat inklusif, serupa dengan tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam dua dekade terakhir, partai-partai seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengalami transformasi yang signifikan dalam strategi serta orientasi politik mereka, terutama dalam menghadapi tantangan demokrasi, pluralisme, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Buehler (2022) menyatakan bahwa partai-partai Islam di Indonesia menunjukkan pendekatan yang semakin pragmatis dan terbuka, khusunya dalam merangkul agenda pembangunan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa "partai-partai Islam di Indonesia telah menunjukkan peningkatan pragmatisme dan inklusivitas, terutama dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan SDGs." Meskipun demikian, berbagai kendala seperti kualitas kaderisasi, transparansi dalam organisasi, dan inovasi politik masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi (Aspinall, Edward, dan Warburton, Eve, 2023).

Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah terdapatnya ketidakcocokan antara ideologi partai, pelaksanaan strategi politik, dan dampak yang nyata terhadap keadilan sosial serta penguatan lembaga inklusif di masyarakat. Untuk itu, solusi yang diusulkan mencakup perbaikan proses kaderisasi, inovasi dalam praktik politik, serta peningkatan kolaborasi antar sektor.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam mengenai perbandingan strategi antara PKB dan PKS dalam upaya mencapai keadilan sosial dan membangun lembaga yang inklusif, serta mengevaluasi kontribusi masing-masing partai terhadap pencapaian SDGs. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara idealisme politik dan praktik yang terjadi di lapangan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan rancangan studi kasus pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Data utama yang digunakan diperoleh dari wawancara mendalam dengan anggota dan pengurus kedua partai, berkas internal partai, serta literatur akademik yang dirilis dalam lima tahun terakhir. Proses pengumpulan data mencakup wawancara semi-terstruktur, pengumpulan dokumen, dan penelaahan pustaka. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-komparatif untuk menemukan perbedaan dan kesamaan dalam strategi, ideologi, serta kontribusi kedua partai terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Fealy. Greg, 2023; Pratama. R., Sihombing. D., 2024). Keaslian data dijamin melalui perbandingan lintas sumber dan pendekatan, serta validasi hasil melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan ahli politik dan praktisi dari partai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi dan Peran Partai Islam Nasionalis PKB dan PKS dalam Mewujudkan Keadilan Sosial dan Lembaga Inklusif Menuju Pencapaian Sustainable Development Goals di Indonesia

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung semangat nasionalisme yang berakar pada agama dengan prinsip yang inklusif. Mereka menekankan pentingnya memperkuat pesantren, menciptakan keadilan sosial, dan melindungi kelompok rentan(Ulzikri et al., 2021). PKB tidak hanya melihat dirinya sebagai partai Islam, tetapi lebih menekankan nilai-nilai Islam yang bersahabat dan membawa manfaat bagi semua orang. Pendekatan ini dianggap berhasil dalam menjangkau keberagaman serta memperkuat posisi partai dalam era demokrasi (Fealy, Greg, 2023). Selain itu, PKB terlibat aktif dalam advokasi kebijakan yang berpihak pada rakyat, termasuk melindungi pesantren dan memberdayakan ekonomi berbasis komunitas.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadikan prinsip idealisme Islam sebagai dasar utama, berfokus pada konsistensi nilai-nilai Islam serta penerapan syariat dalam kebijakan publik. PKS dikenal dengan sistem kaderisasi yang terencana dan semangat tinggi dari para anggotanya. Muhtadi dan Burhanuddin (2022) menyatakan bahwa konsistensi ideologi PKS yang digabungkan dengan strategi koalisi pragmatis membuat partai ini tetap relevan dalam perkembangan politik di tingkat nasional. PKS juga dikenal dengan program pelayanan publik, advokasi untuk memberantas korupsi, serta pendidikan politik yang mengacu pada nilai-nilai Islam.

Dalam hal kaderisasi, PKB menjalankan proses seleksi dan pelatihan politik meskipun mengalami kesulitan dalam menempatkan kader yang berkualitas karena pengaruh uang dalam politik dan popularitas individu (Aspinall, Edward, Warburton, Eve, 2023). PKB berkomitmen untuk memperkuat pendidikan politik dan kewirausahaan bagi anggota muda serta mendorong partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam struktur partai. Di sisi lain, PKS memiliki sistem kaderisasi yang terstruktur dengan pembinaan yang intensif sehingga mampu melahirkan kader yang militan dan berintegritas (Hamid, Ahmad Fuad, 2021). Proses kaderisasi PKS mencakup pelatihan dasar, pembinaan rutin (liqa), penempatan kader di lembaga legislatif dan eksekutif, serta aktif mendorong pengembangan kader perempuan dan pemuda. Kedua partai mulai berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk pendidikan politik, kampanye, dan komunikasi internal. PKS lebih aktif dalam menggunakan media sosial untuk mobilisasi kader, sedangkan PKB lebih fokus memperkuat jaringan pesantren dan komunitas lokal. Inovasi ini dianggap penting untuk memperluas basis dukungan dan meningkatkan pemahaman politik di masyarakat (Rinaldi, Andi, Prasetyo, Dwi, 2023).

Dalam konteks legislatif, PKB memilih untuk berperan sebagai koalisi yang konstruktif, bersikap kritis namun tetap mendukung kebijakan pemerintah yang sesuai dengan Pancasila dan Hak Asasi Manusia. PKB secara aktif mengusulkan RUU mengenai pesantren, mengadvokasi dana desa, serta memberikan perlindungan bagi pekerja migran. Sebaliknya, PKS terlibat aktif dalam pengawasan legislatif, pelayanan publik, dan advokasi untuk keadilan sosial. Partai ini vokal dalam isu pemberantasan korupsi, perlindungan anak, dan kebijakan yang mendukung keluarga. Pratama dan Sihombing (2024) mencatat bahwa strategi parlemen kedua partai semakin terfokus untuk meningkatkan akuntabilitas dan keadilan sosial sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDG 16.

Kontribusi PKB dan PKS terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan tampak dalam sejumlah area. Pada SDG 4 mengenai pendidikan yang berkualitas, kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi yang mereka laksanakan berperan dalam meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia serta pemahaman politik, melalui pelatihan kepemimpinan, seminar edukasi, dan peningkatan literasi digital secara berkala. Mengenai SDG 5 yang membahas kesetaraan gender, advokasi untuk perlindungan anak dan keadilan sosial mendukung upaya menghapus diskriminasi; PKS berkomitmen untuk meningkatkan perwakilan perempuan di lembaga legislatif, sementara PKB berfokus pada pemberdayaan perempuan di pesantren dan lingkungan desa. Terkait SDG 10 yang berorientasi pada pengurangan ketimpangan, PKB aktif dalam pemberdayaan ekonomi di pesantren, sedangkan PKS mendampingi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang beruntung. Pada SDG 16 yang menyoroti kelembagaan yang inklusif, kedua partai mendukung reformasi birokrasi, transparansi anggaran, dan penguatan sistem pengawasan internal. Rinaldi dan Prasetyo (2023) menekankan bahwa keikutsertaan partai politik dalam upaya mencapai SDGs adalah salah satu indikator penting untuk menilai relevansi dan efektivitas mereka dalam memperkuat demokrasi.

Namun, kedua partai menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar. Dari segi internal, PKB perlu memperbaiki kualitas kaderisasi dan mengurangi pengaruh politik uang, sedangkan PKS perlu berinovasi dalam bidang pendidikan politik dan meningkatkan transparansi di internal partai (Siregar, Fitri, 2022). Selain itu, kedua partai juga menghadapi tantangan terkait resistensi terhadap perubahan dan pemanfaatan teknologi digital yang terus berkembang. Tantangan dari luar meliputi polarisasi politik, tekanan dari kelompok yang memiliki kekuasaan, serta kesulitan dalam membangun koalisi antar partai. Selain itu, rendahnya tingkat literasi politik masyarakat dan praktik politik transaksional menjadi penghalang dalam menciptakan lembaga yang inklusif.

Sebagai langkah solusi, diperlukan reformasi dalam kaderisasi, perbaikan transparansi, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi dalam pendidikan politik yang berbasis digital. Kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga internasional juga menjadi faktor kunci untuk memperkuat advokasi keadilan sosial serta lembaga yang inklusif. Pendekatan semacam ini diharapkan mampu

menjawab tantangan yang dihadapi serta memperkuat peran partai politik Islam nasionalis dalam sistem demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN

PKB dan PKS, walaupun memiliki perbedaan dalam cara pandang ideologi dan strategi, keduanya terikat pada prinsip keadilan sosial dan pembentukan lembaga yang inklusif. Keduanya secara aktif berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 4, 5, 10, dan 16. Penguatan pelatihan kader, inovasi dalam politik, dan penyesuaian ideologis menjadi hal yang penting agar partai-partai Islam tetap memiliki relevansi dan pengaruh dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Diperlukan usaha yang terus-menerus untuk meningkatkan pendidikan politik, menjaga transparansi, dan mendorong kerjasama antar sektor dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, baik dari dalam maupun luar.

REFERENSI

[1] Aspinall, Edward; Warburton, Eve. (2023). Dinamika Kaderisasi dan Tantangan Inovasi Politik Partai Islam di Indonesia. Jurnal Politik Indonesia, 18(2), 112-129.

[2] Buehler, Michael. (2022). Pragmatisme dan Inklusivitas Partai Islam Indonesia dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Pusat Studi Politik dan Demokrasi.

[3] Fealy, Greg. (2023). Nasionalisme Inklusif dan Transformasi Strategi PKB di Era Demokrasi. Jurnal Islam dan Politik, 21(1), 77-93.

[4] Hamid, Ahmad Fuad. (2021). Kaderisasi Berlapis dan Pembinaan di PKS: Studi Kasus Sistem Internal Partai. Jurnal Kepartaian dan Demokrasi, 15(3), 201-220.

[5] Muhtadi, Burhanuddin. (2022). Konsistensi Ideologi dan Koalisi Pragmatis PKS dalam Politik Nasional. Jurnal Ilmu Politik, 27(2), 145-162

[6] Pratama, R.; Sihombing, D. (2024). Strategi Parlemen PKB dan PKS dalam Mewujudkan Keadilan Sosial dan Akuntabilitas. Jurnal Legislasi dan Kebijakan Publik, 10(1), 55-70.

[7] Rinaldi, Andi; Prasetyo, Dwi. (2023). Inovasi Digital dan Partisipasi Partai Politik dalam Agenda SDGs di Indonesia. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 8(4), 231-245.

[8] Siregar, Fitri. (2022). Tantangan Internal Partai Politik Islam: Kaderisasi dan Transparansi di Era Digital. Jurnal Reformasi Politik, 12(2), 88-104.

[9] Ulzikri, A. R., Kurniawan, R. C., & Indrajat, H. (2021). Budaya Politik Warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung : Belajar dari Pencalonan Ma ' ruf Amin dalam Pemilihan Umum 2019 Political Culture of Nahdlatul Ulama Citizens of Bandar Lampung : Learning from Ma ' ruf Amin ' s Candidacy in the 2019 General Elec. *Nahkoda Ilmu Pemerintahan*, *20*(01), 1–16. https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.108